

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU PRA KERJA PADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

## IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF THE PRE-EMPLOYMENT CARD PROGRAM AT PRIVATE JOB TRAINING INSTITUTIONS (LPKS) IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

Aryanisila<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Public Administration  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang

Email: <sup>1)</sup> aryanisila007@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Received [05 February 2022]

Revised [15 February 2022]

Accepted [01 March 2022]

### KEYWORDS

Policy Implementation, Pre-  
Employment Card, Private Job  
Training Institute.

This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](#) license



### ABSTRAK

Kebijakan Kartu Pra Kerja sebagai salah satu solusi dalam penanganan dampak COVID-19 dari aspek ketenagakerjaan. Di mana para penerima manfaat merupakan para pencari kerja dan juga pekerja informal maupun formal yang terkena dampak langsung dari virus corona ini. Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan yang berbasis daring (online) dan offline. Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruang guru, Mau Belajar Apa, Haruka Edu, Pijar Mahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga pelatihan yang akan melaksanakan pelatihan juga melibatkan swasta untuk mengimplementasikan program ini dalam hal ini yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Lattas) sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) menjadi salah satu mitra dalam menyelenggarakan Pelatihan baik secara online dan offline namun di Provinsi Sumatera Selatan hanya beberapa LPKS saja yang bisa lolos menjadi mitra kartu pra kerja, hal ini dikarenakan banyaknya kualifikasi dan standar khusus yang menjadi syarat LPKS untuk dapat menjadi mitra kartu pra kerja dan masih sedikitnya jumlah LPKS yang bisa lolos verifikasi mitra kartu pra kerja, tidak hanya lolos verifikasi mitra saja tetapi lolos verifikasi program pelatihan yang ditawarkan oleh LPKS untuk calon peserta kartu pra kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan metode Partisipatory Action Reseach (PAR). Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data sampai pada tahap laporan hasil. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, wawancara dan narrative. Adapun yang menjadi Subyek / informan dalam penelitian ini diantaranya adalah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Kabid Lattas (Pelatihan dan Produktifitas), Kabid Sertifikasi Lembaga pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ,

Pengelola LPK Widya, LPK SPED, LPK Kiamory Academy, Masyarakat Umum pendaftar kartu pra kerja yang lolos dan yang tidak lolos verifikasi untuk menjadi peserta kartu pra kerja. Program Kartu Prakerja yang sedang berjalan di tengah Pandemi Covid-19 perlu untuk segera dilakukan evaluasi dan pertimbangan yang bijak khususnya untuk lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang eksistensi dan peningkatan kualitasnya perlu di support dan dibimbing, melakukan inovasi - inovasi baru dengan memanfaatkan sistem digitalisasi serta multi benefit yang didapatkan oleh peserta kartu pra kerja sekaligus untuk memberikan kepercayaan diri terhadap LPKS yang tersebar di daerah / kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat bersaing bahkan bermitra dengan platform digital yang ada. Koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota kedepannya perlu ditingkatkan lagi agar program kartu prakerja lebih maksimal pelaksanaannya di Sumatera Selatan.

#### **ABSTRACT**

*The Pre-Employment Card Policy is one of the solutions in handling the impact of COVID-19 from the employment aspect. Where the beneficiaries are job seekers and also informal and formal workers who are directly affected by this corona virus. The Pre-Employment Card is a competency development and productivity improvement program through online and offline-based training fees. Digital platforms that have collaborated with the Pre-Employment Card Program to date include: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, What to Learn, Haruka Edu, Pijar Mahir, Sekolah.mu and Sisnaker. The Ministry of Manpower has prepared a Job Training Center (BLK) as one of the training institutions that will carry out training and also involve the private sector to implement this program, in this case the Private Job Training Institute (LPKS). The Department of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province through the field of Training and Labor Productivity (Lattas) as implementing policies in the field of implementing job training and improving the quality of management of training institutions. Private Job Training Institutes (LPKS) are one of the partners in conducting training both online and offline, but in South Sumatra Province only a few LPKS can qualify as pre-employment card partners, this is due to the many qualifications and special standards that are required by LPKS to can become a pre-employment card partner and there are still at least a number of LPKS that can pass the pre-employment card partner verification, not only passing the partner verification but passing the verification of the training program offered by LPKS for prospective pre-employment card participants. This study uses a qualitative and descriptive approach using the Participatory Action Research (PAR) method. The presence of researchers in this study as the main instrument in data collection to the stage of reporting the results. The data sources used in this study are primary data sources, interviews and narratives. The subjects/informants in this study included the Head of the Manpower and Transmigration Service of South Sumatra Province, Head of Lattas (Training and Productivity), Head of Institutional Certification at the Manpower and Transmigration Office of South Sumatra Province, Manager of LPK Widya, LPK SPED, LPK Kiamory Academy, the General Society of pre-employment card registrants who pass and those who do not pass verification to become pre-employment card participants. The Pre-Employment Card Program which is running in the midst of the Covid-19 Pandemic needs to be evaluated immediately and wise considerations, especially for private job training institutions (LPKS) whose existence and quality improvement need to be supported and guided, making new innovations by utilizing the digitalization system. as well as the multi benefits obtained by pre-employment card participants as well as to give confidence to LPKS spread across regions / cities in South Sumatra to be able to compete and even partner with existing digital platforms. Coordination and collaboration between district / city governments in the future needs to be further improved so that the pre-employment card program can be implemented more optimally in South Sumatra..*

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan Kartu Pra Kerja sebagai salah satu solusi dalam penanganan dampak COVID-19 dari aspek ketenagakerjaan. Anggaran senilai 20 triliun rupiah dinilai sangat besar dibandingkan dengan dampak yang akan dirasakan, khususnya pada saat seperti ini dimana para penyedia lapangan kerja cenderung membatasi rekrutmen pekerja baru atau bahkan merumahkan beberapa pekerjanya.

Kartu pra-kerja adalah program pemerintah yang dibuat untuk membantu para pekerja yang terkena dampak dari pandemi virus corona (covid-19). Di mana para penerima manfaat merupakan para pencari kerja dan juga pekerja informal maupun formal yang terkena dampak langsung dari virus corona ini. Para pekerja ini memiliki usia minimal 18 tahun. Kartu prakerja merupakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan. Program ini ditujukan kepada semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah, dan mereka yang terkena dampak langsung dari Covid-19. Selanjutnya, pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari Program Kartu Prakerja tersebut akan dipercepat. Hal ini sebagai salah satu langkah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, tujuannya juga untuk memberi perlindungan sosial dan menanggulangi dampak negatif dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan Program Kartu Prakerja tidak berhenti menjadi sorotan publik. Sejak pertama kali digagas Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019, program ini terus memunculkan perdebatan publik, bahkan dituding sebagai program bagi-bagi dana kepada pengangguran. Pidato Presiden Jokowi tertanggal 16 Agustus 2019 dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN tahun anggaran 2020, beserta Nota Keuangannya menyatakan bahwa salah satu kunci untuk memajukan Indonesia adalah dengan cara meningkatkan daya saing nasional yang bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja untuk mendukung pengembangan SDM dengan besaran alokasi Rp. 8-10 triliun. Pada bulan Februari 2020, program ini resmi memiliki landasan hukum melalui disahkannya Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Pemerintah berharap melalui program ini dapat mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berkualitas untuk menghadapi pasar kerja di Indonesia.

Namun, manakala pandemi Covid-19 menerpa hampir di seluruh negara dunia dengan cepatnya penularan virus dan besarnya tingkat kematian memaksa pemerintah semua negara mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown, akibatnya perekonomian nyaris terhenti. Gelombang Pemutusan Hak Kerja (PHK) merebak di sejumlah sektor, mulai sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lain sebagainya. Selain itu, daya tahan ekonomi di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian.

Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah / kuliah, dan mereka yang terkena dampak langsung dari Covid-19. Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa wabah Covid-19 adalah yang berbasis daring (online) dan yang berbasis offline. Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Kemenko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah penanggung jawab program Kartu Prakerja dan Manajemen Pelaksana adalah pelaksana operasional program.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga pelatihan yang akan melaksanakan pelatihan melalui Program Kartu Prakerja. Kendati demikian, pemerintah juga melibatkan swasta untuk mengimplementasikan program ini dalam hal ini yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Lattas) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan. Sejak di bukanya pendaftaran Kartu Pra Kerja dari tahun 2019, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) menjadi salah satu mitra dalam

menyelenggarakan Pelatihan baik secara online dan offline namun hanya beberapa LPKS saja yang bisa menjadi mitra kartu pra kerja ini, hal ini dikarenakan banyaknya kualifikasi dan standar khusus yang menjadi syarat LPKS dapat menjadi mitra kartu pra kerja dan menyelenggarakan pelatihan berbagai ketrampilan dan kompetensi dari program yang di tawarkan.

Kebijakan kartu prakerja bukan sekedar diniatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan tenaga kerja saja, akan tetapi harus di tingkatkan juga kualitas platform /mitra dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh pekerja dan para pencari kerja khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

## LANDASAN TEORI

### Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik, sebagaimana yang kita sering dengar dari ungkapan Thomas R. Dye (2002) ialah "whatever governments choose to do or not". Senada dengan itu, Edward III (1980) pun mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah "what government say and do, or not to do. It is the goals or pupose of government programs". Adapun, kebijakan publik, ungkap Widodo (2008, h. 12) sebagai serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adapun bila kita berpijak pada argumen Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Agustino (2017), Subarsono (2009), Winarno (2007) dan Wahab (1997) bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 komponen, yakni: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Beberapa komponen tersebut sebagai suatu sistem yang harus diperhatikan yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan (capaian tujuan) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

**Pertama, Komunikasi.** Komunikasi yang terjalin harus mampu menjembatani segala macam bentuk kepentingan, baik antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima dan dimengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan oleh seluruh pelaksana kebijakan. Terdapat 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, ungkap Edward III (dalam Agustino, 2017) yakni: (a) Transmisi: Masalah dalam penyaluran komunikasi salah satunya ialah miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus di lalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang di harapkan terdistorsi di tengah jalan; (b) Kejelasan: Komunikasi yang diterima oeh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan publik; dan (c) Konsistensi: Perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas untuk dipraktikkan. Jika perintah sering berubah rubah, maka dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

**Kedua, Sumber Daya.** Pandangan Edward III (dalam Agustino, 2017) bahwa sumber daya kebijakan merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan secara lebih, sebab dengan tidak adanya sumber daya maka kebijakan hanya akan menjadi konsep atau rencana yang tidak memiliki pengaruh apapun terlebih dalam memecahkan permasalahan dilapangan. Komponen sumber daya meliputi: (a) Jumlah staf dan keahlian dari pelaksana; (b) Informasi yang relevan; (c) Adanya kewenangan yang menjamin program; serta (d) Adanya fasilitas pendukung (dana, sarana dan prasarana).

**Ketiga, Disposisi.** Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2017), disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Jika implementor mempunyai kecenderungan positif terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan yang telah dirumuskan. Begitupun sebaliknya, bila bersikap negatif -karena konflik kepentingan- maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang cukup serius. Adapun disposisi implementator dibedakan menjadi 3 hal, yaitu: (a) Respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) Intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut. Terakhir, Struktur Birokratik. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa instansi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif. Pemahaman struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana terkait dengan implementor kebijakan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, dan institusi lainnya. Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2007) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: (a) Standard Operational Procedure (SOP); dan (b)

Fragmentasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Disisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Selain itu, keberhasilan implementasi harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya SOP sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

### **Program Kartu Prakerja**

Program Kartu Prakerja, sebagaimana informasi yang didapat dari laman resmi [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id) merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Singkatnya, semua warga negara yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang menjalankan pendidikan formal.

Kartu Prakerja dilatar belakangi oleh berbagai keadaan (dalam RAPBN, 2020), diantaranya: (1) Keadaan ketenagakerjaan Indonesia dengan 63% lulusan pendidikan formalnya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; (2) Revolusi Industri 4.0 akan menimbulkan gap antara kompetensi tenaga kerja saat ini dengan masa mendatang; dan (3) Bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia pada tahun 2030-2040. Kartu Prakerja menjadi relevan dengan kondisi ketenagakerjaan Indonesia serta tantangan masa depan. Apabila dilihat dari angka pengangguran persentasenya capaian dalam beberapa tahun terakhir dapat dikatakan cukup baik yaitu sekitar 5,28% atau sekitar 7 juta orang di tahun 2019. Namun angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi tenaga kerja di Indonesia. Beberapa tren yang perlu mendapatkan perhatian khusus antara lain semakin tingginya penganggur terdidik, mismatch antara lapangan pekerja yang tersedia dan tenaga kerja yang tersedia serta masih tingginya angka pengangguran muda. Estimasi International Labor Organization (ILO) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penduduk muda yang sedang tidak bersekolah, bekerja maupun dalam pelatihan tertinggi di Asia Tenggara yaitu mencapai 22% dari total penduduk muda berumur 15-24 tahun. Selanjutnya, Indonesia juga harus berpacu dengan tren otomatisasi dan robotisasi di dunia.

Salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh dunia usaha, ungkap Rafitrandi (2020) ialah sulitnya untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap kerja. Namun, hal ini juga dikarenakan budaya pelatihan di Indonesia yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya insentif bagi perusahaan karena investasi yang dibutuhkan tidak kecil dan belum sebanding dengan hasil, ditambah lagi kemungkinan akan dibajak oleh perusahaan lain. Survei yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo, 2014) bahwa dalam konteks pembangunan manusia dan pelatihan menemukan bahwa sangat sedikit perusahaan yang menyediakan anggaran pelatihan dari total biaya operasional. Selain itu, studi dari Bank Dunia (2019) juga menemukan hal yang sama bahwa isu pelatihan dan pendidikan bukan merupakan prioritas utama perusahaan. Di sinilah fungsi program kartu prakerja untuk mengisi kekosongan sebagai jembatan sebelum memulai karier maupun pindah agar ada peningkatan keterampilan dan relevansi untuk bekerja maupun berwirausaha. Berikut sejumlah manfaat yang didapat dari Program Kartu Prakerja sebagaimana yang dipaparkan Prasetyo dan Bangun (2019), yakni: (1) Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan; (2) Mengurangi biaya dalam mencari informasi mengenai pelatihan; (3) Mendorong ke bekerjaan seseorang melalui pengurangan mismatch; (4) Menjadi komplemen dari Pendidikan Formal; dan (5) Membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan metode Partisipatory Action Reseach (PAR). Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data sampai pada tahap laporan hasil. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, wawancara dan narrative. Adapun yang menjadi Subyek / informan dalam penelitian ini diantaranya adalah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sumatera Selatan, Kabid Lattas (Pelatihan dan Produktifitas), Kabid Sertifikasi Lembaga pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Pengelola LPK Widya, LPK SPED, LPK Kiamory Academy, Masyarakat Umum pendaftar kartu pra kerja yang lolos dan yang tidak lolos verifikasi untuk menjadi peserta kartu pra kerja.

Bogdan dan Biklen (1992;29) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga diperoleh suatu pemahaman dan penjelasan tentang terjadinya suatu proses. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisa dan bukan data-data yang bersifat statistik. Oleh karena itu penjelasan tidak berupa angka melainkan berupa kata-kata dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti, dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini juga tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya, seperti dikatakan Alwasilah (2003;97) bahwa: "Penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori, tapi berangkat dari kasus atau pengamatan". Senada dengan Alwasilah, Sugiyono (2005;1) mengatakan: "Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Mulyono Yalia tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan".

Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek seperti dikatakan Sugiyono (2005;1) bahwa; "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci...". Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono (2005;1) mengatakan bahwa "Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya".

Surachmad (2004;140) mengatakan bahwa: "Penelitian kualitatif bersifat induktif, karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus". Menurut Surachmad dalam penelitian kualitatif objek yang diteliti dari satu unit atau kesatuan unit dipandang sebagai kasus. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa dari satu wilayah, ataupun satu kelompok manusia dan kelompok objek-objek lain yang cukup terbatas dipandang sebagai satu kesatuan.

Melalui metode kualitatif maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi tentang implementasi kebijakan Kartu Pra Kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Provinsi Sumatera Selatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Implementasi dari program Kartu Prakerja yang sedang berjalan menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19. Berikut penulis uraikan bagaimana implementasi kebijakan Kartu Prakerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), yang dibedah dan berpijak pada teori Implementasi Kebijakan dari Edward G. III (dalam Agustino, 2017; Subarsono, 2009; Winarno, 2007; Wahab, 1997) bahwa implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni: (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

Pertama, perihal Komunikasi. Sejak di keluarkannya program Kartu Pra Kerja oleh pemerintah tentunya mendapat sambutan pro dan kontra dari masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19 ini namun tujuan penyelenggaraan program ini tentunya sebagai wujud peduli pemerintah khususnya terhadap para tenaga kerja dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terkena dampak langsung akibat pandemi ini. Informasi dan sosialisasi program kartu pra kerja ini harus lebih digalakkan lagi. Pemerintah harus dapat meluruskan bahwa program kartu prakerja bukan bertujuan untuk menggaji pengangguran, melainkan memberi insentif pelatihan yang bertujuan menambah ketrampilan dan kompetensi. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dapat menjadi salah satu platform digital kartu pra kerja, menjadi salah satu mitra kartu pra kerja melalui Sisnaker harus dapat bersaing dan membuktikan bahwa mereka layak untuk dapat ikut andil memberikan pelatihan kepada peserta kartu pra kerja. Harus ditekankan juga bahwa peserta memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari peserta dengan motivasi yang keliru sehingga berpotensi

menciptakan kegagalan pasar dalam program ini. Apalagi mengingat pada saat ini banyak angkatan kerja yang tidak lagi mendapatkan penghasilan. Program kartu prakerja akan membantu meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pekerja. Ini tentunya akan berkontribusi positif dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi ketika pandemi Covid-19 ini berakhir nantinya. Kemudian, terkait dengan bertambahnya prioritas target penerima manfaat kartu prakerja ini seperti sektor informal dan UMKM akan menjadi tantangan tersendiri. Program ini mensyaratkan peserta untuk lolos seleksi yang berarti calon peserta harus mau dan mampu untuk mengikuti program pelatihan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Selain itu, berbagai tuduhan terkait pemilihan mitra yang tidak transparan, adanya konflik kepentingan dan berpotensi hanya menguntungkan sekelompok pihak terus bergulir, bukanlah hal sepele, apalagi menyangkut dana APBN sebesar Rp. 5,6 triliun. Adapun klarifikasi dari Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja/PMO diberbagai portal media online menjelaskan bahwa proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Peraturan Kartu Prakerja didasari oleh Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang terbit pada 28 Februari 2020. Selain itu pemilihan mitra dalam pelatihan online pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja. Oleh karenanya, Pemerintah dituntut melakukan lelang secara terbuka dalam menentukan platform sebagai mitra penyelenggara pelatihan. Selain itu, platform lebih bersifat marketplace, yakni hanya mempertemukan peserta prakerja dengan para penjual modul pelatihan. Dana pelatihan diberikan langsung kepada peserta prakerja yang kemudian digunakan untuk belanja modul pelatihan di marketplace mitra pemerintah. Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga pelatihan yang akan melaksanakan pelatihan melalui Program Kartu Prakerja. Kendati demikian, pemerintah juga melibatkan swasta untuk mengimplementasikan program ini dalam hal ini yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Lattas) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan. Sejak di bukanya pendaftaran Kartu Pra Kerja dari tahun 2019, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) menjadi salah satu mitra dalam menyelenggarakan Pelatihan baik secara online dan offline namun hanya beberapa LPKS saja yang bisa menjadi mitra kartu pra kerja ini, hal ini dikarenakan banyaknya kualifikasi dan standar khusus yang menjadi syarat LPKS dapat menjadi mitra kartu pra kerja dan menyelenggarakan pelatihan berbagai ketrampilan dan kompetensi dari program yang ditawarkan. Kebijakan kartu prakerja bukan sekedar diniatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan tenaga kerja saja, akan tetapi harus di tingkatkan juga kualitas platform/mitra dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh para pencari kerja khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 164 lembaga pelatihan kerja swasta yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota dengan program pelatihan yang beraneka ragam diantaranya di bidang IT, Tata Boga, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Perhotelan, Tata rias kecatikan wajah dan kulit, Tata rias pengantin, Tata rias rambut, Seni kerajinan, Kewirausahaan, Komputer, Desain Grafis, dan lain-lain. Namun yang berhasil menjadi mitra kartu pra kerja hanya beberapa saja hal ini disebabkan minimnya informasi mengenai kesempatan LPKS itu sendiri untuk menjadi mitra kartu pra kerja sehingga ketika lembaga pelatihan kerja mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu mitra dari platform Kementerian Tenaga Kerja ada anggapan bahwa semua LPKS dapat langsung menjadi mitra padahal ada beberapa kriteria dan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah untuk LPKS dapat menjadi mitra kartu pra kerja yaitu kriteria dan syarat administrasi dan syarat teknis, adapun untuk kriteria teknis calon Lembaga Pelatihan untuk program kartu pra kerja, yaitu :

1. Memiliki kerjasama dengan Mitra PD yang ditandai dengan bukti hukum serta dicantumkannya LP beserta pelatihan yang diselenggarakannya pada situs platform yang dimiliki Platform Digital.
2. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja dan/atau kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha yang dijabarkan secara jelas dalam silabus atau deskripsi pelatihan yang diselenggarakannya.

3. Mampu menyelenggarakan pelatihan secara interaktif.
4. Memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja, termasuk.
  - a. Sistem pendaftaran dan pemantauan kehadiran peserta.
  - b. Mekanisme belajar dan interaksi antara Pengajar/Instruktur dan para peserta.
  - c. Sistem evaluasi belajar terhadap para peserta pelatihan dan
- d. Sertifikat sebagai tanda kehadiran dan/atau kelulusan peserta.
5. Memiliki kurikulum, silabus, dan Instruktur yang kompeten yang ditampilkan pada situs portal resmi dan/atau media informasi lainnya, yang berupa deskripsi pelatihan yang berisi modul pelatihan, jadwal kelas, dan Pengajar (Instruktur) untuk masing-masing jenis/kelas pelatihan yang diselenggarakannya.
6. Mampu menyusun sistem evaluasi pembelajaran peserta yang mencakup penilaian terhadap pemahaman dan tingkat penyerapan peserta terhadap materi ajar/latih.
7. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai untuk setiap jenis/kelas pelatihan yang diselenggarakan, antara lain webinar, e-book, atau LMS interaktif untuk metode ajar/latih dalam jaringan (daring) atau kelas praktek dan interaktif untuk metode luar jaringan (luring).
8. Menyediakan tenaga pelatih dengan kualifikasi sebagai Instruktur, Professional maupun Business Owner yang relevan dengan materi ajar/latih.
9. Memiliki layanan tanya jawab atau diskusi antara peserta pelatihan dengan pelatih maupun antar peserta terkait materi ajar/latih dan aplikasinya.
10. Memiliki layanan pelanggan yang dapat diakses setiap waktu dan ditujukan untuk melayani dan menangani keluhan peserta.

Pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap mitra dan penyediaan pelatihan Kartu Prakerja, dan membuka seluas-luasnya bagi mitra untuk menyediakan berbagai pelatihan, serta mitra yang telah ada telah melalui verifikasi dan supervisi sesuatu aturan yang berlaku.

Kedua, Sumber Daya. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20 triliun untuk Kartu Prakerja. Alokasi tersebut memiliki porsi 4,9% dari total keseluruhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp. 405,1 triliun. Sebanyak Rp. 19,8 triliun digunakan sebagai insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp. 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id), dengan komposisi Rp. 1 juta untuk pelatihan (total dana pelatihan sebesar Rp. 5,6 triliun), Rp. 2,4 juta sebagai insentif tunai (Rp. 600 ribu/bulan selama 4 bulan), dan Rp. 150 ribu merupakan kompensasi survei (Rp. 50 ribu selama 3 kali), dan sisanya digunakan sebagai operasional program.

Alokasi anggaran yang mencapai Rp. 5,6 triliun menuai kritik, beberapa diantaranya oleh Anggota DPR yakni Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Siti Mukaromah (Fraksi PKB) dan Achmad Hatari (Fraksi NasDem). Fadli mempertanyakan besaran anggaran pelatihan Kartu Prakerja yang menurutnya tidak masuk akal. Materi pelatihan Prakerja menurutnya penting, namun untuk membuat video tutorial pelatihan, apakah harus sebesar itu anggaran yang harus dialokasikan (dalam [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co), 4/04). Senada dengan itu, Siti dan Achmad mengutarakan bahwa dana Rp. 5,6 triliun lebih baik dialihkan untuk bantuan sosial ketimbang untuk biaya pelatihan. Mereka menyayangkan pemerintah menyediakan pelatihan kerja ditengah pandemi Covid-19, sebab saat ini tidak ada perusahaan yang dapat menerima pekerja, malah yang terjadi PHK. "Maka lebih bijak, anggaran tersebut dialihkan menjadi Bansos bagi para Pekerja Korban PHK", ungkapnya dalam [m.detik.com](http://m.detik.com) (4/04).

Apabila diasumsikan bahwa Kartu Prakerja ditransformasikan dari pelatihan menjadi Bantuan Langsung Tunai/BLT dengan manfaat sebesar Rp. 600 ribu/bulan selama 4 bulan dan difokuskan pada korban PHK saja, maka total yang tercatat bisa mencapai 8,33 juta korban PHK. Dalam laman situs [kemnaker.go.id](http://kemnaker.go.id), per 21 April, Kemnaker mencatat sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19. Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan di PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Adapun perihal Sumber Daya Implementor, yang bertugas sebagai Penanggung Jawab dalam merumuskan kebijakan, dan mengendalikan Program Kartu Prakerja ialah Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO). Kartu Prakerja dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pelaksana Operasional Kartu Prakerja dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Berikut komposisi Komite Cipta Kerja yang meliputi 8 Kementerian yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), Kepala Staf Kepresidenan (Wakil Ketua), dan 6 Menteri sebagai anggota, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri,

dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sekretaris Komite). Didesain sebagai sebuah produk, Kartu Prakerja dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus bagi sektor swasta. Adapun jenis pelatihan yang dapat diambil di masa pandemi Covid-19 ialah berbasis daring. Dengan demikian, Pemerintah bekerjasama dengan 8 Platform digital sebagai Mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja, yakni Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, HarukaEdu, Sekolah.mu, PijarMahir, MauBelajarApa, dan Sisnaker, ditambah 4 mitra aplikasi yakni BNI, OVO, Gopay dan Linkaja sebagai penyedia dompet digital untuk transaksi dana selama program ini berjalan. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Program ini sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat.

Ketiga, Disposisi. Keterlibatan 8 platform digital sebagai mitra penyelenggara Kartu Prakerja menuai polemik. Pasalnya, kesemua platform tersebut telah digandeng pemerintah sebelum payung hukum yakni Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja diterbitkan pada 28 Februari 2020, dan Permenkeu No. 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja yang diterapkan serta Permenko No. 3 Tahun 2020 yang diundangkan pada 27 Maret 2020. Nota Kesepahaman antara platform dengan Pemerintah dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dilakukan pada 20 Maret 2020 (terlambat seharusnya November 2019). Pemerintah mengklaim kerjasama dengan mitra telah sesuai dengan landasan hukum. "Tidak ada proses tender maupun penunjukan dari pihak pemerintah kepada 8 platform untuk menjadi mitra. Yang dilakukan pemerintah hanya memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan melalui platform digital, dan masyarakat memilih sendiri jenis pelatihan yang diminati. Sementara kerjasama antara mitra dengan lembaga pelatihan berlaku secara business to business", ungkap Panji selaku Dir. Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (dalam kompas.com, 23/04). Sementara itu, Denni Purbasari selaku Dir. Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengungkapkan peninjauan kerjasama antara pemerintah dengan mitra telah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu. Bahkan penandatanganan kerjasama seharusnya dilakukan lebih cepat pada November 2019. Harapannya, agar investor yang berada dibalik mitra dapat menginvestasikan dana lebih besar. Selain itu, bila kita tinjau dengan seksama bahwa Permenkeu No. 25/PMK.05/2020 dan Permenko No. 3 Tahun 2020 menjadi mendesak setelah diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 sebagai solusi perekonomian ditengah situasi krisis karena pandemi Covid-19. Narasi urgensi inilah yang kemudian menjadikan semua terlihat wajar jika Kartu Prakerja dan para mitranya langsung mengudara ditengah pandemi Covid-19.

Hal ini tentu membuat kesempatan lembaga pelatihan kerja swasta yang tersebar di Kabupaten/kota di provinsi menjadi kecil kemungkinan untuk dapat lolos verifikasi menjadi mitra kartu pra kerja karena mereka harus bersaing dengan platform digital lainnya yang sudah eksis dan diakui keunggulannya jauh sebelum pandemi melanda negeri ini. Dampak pandemi Covid 19 yang sangat dirasakan di daerah membuat para pengelola LPKS merasa optimis untuk mendapatkan keuntungan dari program kartu pra kerja ini karena angka pengangguran dan pekerja yang terkena dampak langsung pandemi sangat banyak jumlahnya di daerah yang sebagian merupakan migrasi dari pekerja di kota besar yang kembali ke kampung halaman karena sudah tidak bekerja lagi. Berbagai upaya dan koordinasi terus dilakukan, dukungan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Disnakertrans Drs. H. Koimudin, M.M dan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja (Kabid Lattas) Ir. H Mansyur Husin, S.Sos.,M.Si yang menampung aspirasi pengelola LPKS dan memberi support agar LPKS di Provinsi Sumatera Selatan bisa mendapatkan kesempatan menjadi mitra kartu pra kerja dan ikut andil dalam peningkatan kompetensi para pekerja dan pencari kerja di masa pandemi. Dengan mendata dan mengevaluasi lembaga pelatihan kerja swasta yang ada dan memenuhi kriteria yang ditentukan untuk menjadi mitra kartu pra kerja untuk segera mengajukan permohonan melalui aplikasi yang tersedia namun verifikasi akhir tetap dilakukan oleh Kemnaker Pusat sehingga masing - masing LPKS memang harus membuktikan diri agar layak terverifikasi untuk menjadi mitra kartu prakerja. Hal ini berat untuk dilakukan mengingat kompetitor LPKS merupakan platform digital yang sudah diakui keberadaan dan keunggulannya tetapi program yang ditawarkan di LPKS dapat menjadi alternative pilihan bagi para peserta kartu prakerja khususnya yang berada di daerah untuk mengikuti pelatihan yang ditawarkan LPKS secara luring mengingat terkadang signal internet menjadi salah satu kendala jika peserta kartu prakerja dari daerah yang lolos verifikasi mengikuti pelatihan pada platform selain LPKS

yang menawarkan pelatihan secara online. Upaya ini berhasil dan menghasilkan adanya beberapa LPKS di Provinsi Sumatera Selatan yang lolos verifikasi menjadi mitra kartu pra kerja diantaranya LPK Widya di Kota Prabumulih, LPK Kiamory Academy, LPK Ekselen, LPK Sped di kota Palembang. Namun untuk pelaksanaan program pelatihan LPKS yang sudah lolos verifikasi ini belum semuanya dapat menyelenggarakan pelatihan secara mandiri karena seleksi program pelatihan ini sangatlah ketat, program pelatihan yang di tawarkan harus mampu bersaing dan memberikan multi benefit bagi pemegang kartu pra kerja. Ini yang perlu menjadi perhatian pihak terkait dalam pembinaan kepada para Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Terakhir, Struktur Birokrasi. Pendataan Kartu Prakerja yang terdampak pandemi Covid-19, ungkap Susiwijono selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja, merupakan upaya lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. "Dengan kerjasama antar kementerian, program Kartu Prakerja dapat menasar mereka yang paling membutuhkan" ungkapnya dalam prakerja.go.id. Disamping Project Management Office (PMO) yang kurang jelas, mekanisme pengawasan terhadap program ini pun dipertanyakan. "Program Kartu Prakerja seharusnya ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan diawasi oleh Komisi IX DPR. Bukan dibawah tanggung jawab Kemenko Bidang Perekonomian yang tidak memiliki mitra kerja Komisi DPR. Sehingga pengawasan publik dilemahkan", ungkapnya.

Pada awal ditetapkannya Sisnaker sebagai salah satu platform kartu pra kerja dimana Lembaga Pelatihan Kerja Swasta menjadi salah satu mitra, pengelola LPKS merasa optimis dengan akan banyaknya peserta kartu pra kerja khususnya yang berdomisili di wilayah yang sama dengan lokasi LPKS akan mengakses dan mendaftar program pelatihan yang ditawarkan namun dengan aturan yang ketat yang mengharuskan calon peserta kartu pra kerja mendaftar dan mengakses data terpusat dan dengan verifikasi yang ketat untuk calon pekerja untuk dapat lolos dan di nyatakan sebagai peserta kartu prakerja maka kesempatan LPKS untuk dapat menjaring calon peserta kartu pra kerja sia - sia terlebih lagi dengan adanya kriteria dan syarat yang harus di penuhi LPKS untuk dapat lolos menjadi mitra kartu pra kerja di daerah sangat sulit di penuhi sedangkan peminat dan calon peserta kartu pra kerja banyak yang berasal dari daerah tersebut.

Di lain pihak, Program Kartu Prakerja ini, ungkap Aviliani selaku Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam Diskusi Online tertanggal 2 Mei 2020, dinilainya kurang mengandalkan Pemerintah Daerah, namun hanya mengandalkan instruksi Pemerintah Pusat. Padahal, ungkapnya, Pemerintah Daerah lebih memahami karakteristik penduduknya, terutama korban PHK. Disamping tidak tepat sasaran karena yang dibutuhkan bantuan langsung tunai bukan pelatihan online- tidak semua korban PHK di daerah memiliki akses internet ataupun komputer yang menjadi syarat pelatihan Kartu Prakerja. Sehingga, "seharusnya anggaran Rp. 20 triliun, di berikan saja kepada Pemerintah Daerah, kemudian menyalurkannya ke pihak yang menjadi sasaran, dimana Pemerintah Pusat memberikan sejumlah syarat kepada daerah dan mengawasi dalam pelaksanaannya" tegasnya.

Dengan beberapa catatan tersebut, kiranya Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid- 19 yang saat ini sudah selesai pelaksanaannya agar dapat segera dievaluasi dan mengalihkannya menjadi sepenuhnya Program BLT. Pemerintah harus mampu memperluas pemberian BLT. Jika segmen lain telah tercover oleh Bansos, maka bagi mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan atau pendapatan, anggaran Kartu Prakerja dapat dialihkan menjadi Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai namun tetap dengan pengawasan dan transparansi yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bersama Ir.H.MansyurHusin,S.Sos.,M.Si selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas (LATTAS) di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan bahwa kurang produktifnya pelatihan yang dilakukan secara online karena program pelatihan yang di laksanakan pada lembaga pelatihan bersifat life skill yang proses pembelajarannya lebih banyak secara praktik (offline atau tatap muka) dan berlangsung di lembaga pelatihan yang berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan tidak menggunakan lembaga pelatihan yang ada di Jakarta. Kelemahan juga terdapat pada koordinasi, yaitu tidak adanya koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya membantu masyarakatnya dalam pendaftaran kartu prakerja ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja yang sedang berjalan di tengah Pandemi Covid-19 perlu untuk segera dilakukan evaluasi dan pertimbangan yang bijak khususnya untuk lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang eksistensi dan peningkatan kualitasnya perlu di support dan dibimbing untuk menjadi

lembaga yang menyelenggarakan program - program pelatihan yang berkualitas yang di dukung oleh inovasi - inovasi baru dengan memanfaatkan sistem digitalisasi serta multi benefit yang didapatkan oleh peserta kartu pra kerja sekaligus untuk memberikan kepercayaan diri terhadap LPKS yang tersebar di daerah / kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat bersaing bahkan bermitra dengan platform digital yang ada apalagi dalam mencapai target awal untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi pasar kerja Indonesia kedepan, transparansi dan akuntabilitas pemilihan mitra penyedia layanan pelatihan kerja, validitas data yang lemah terkait sasaran program, pengawasan anggaran, koordinasi antar instansi terkait dan payung hukum.

Hadirnya Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19 seolah dipaksakan pemerintah dalam memberdayakan pekerja terdampak PHK, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Padahal mereka yang terdampak, saat ini lebih membutuhkan dana riil sebagai bantuan sosial, bukan malah pelatihan (online). Kartu Prakerja ialah sebuah konsep yang baik, tetapi tak mencukupi untuk menjawab seluruh persoalan ketenagakerjaan kita. Pelatihan yang ditawarkan dalam rangka meningkatkan kompetensi angkatan kerja memang memiliki sisi kualitas dari supply angkatan kerja. Tetapi, selama permintaan terhadap tenaga kerja tidak ditingkatkan, lapangan kerja tidak diciptakan, persoalan pengangguran akan terus menghantui perekonomian, apalagi ini terjadi di tengah pandemi Covid-19.

### Saran

Agar lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dapat menjadi mitra program kartu pra kerja maka sebaiknya perlu melakukan hal - hal sebagai berikut :

1. Mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi berkala dan meningkatkan kualitas lembaga dengan menciptakan program - program pelatihan yang up to date dan sesuai dengan perkembangan zaman karena pada umumnya peserta kartu pra kerja adalah para generasi muda milenial yang sangat peka terhadap perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan baru.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja agar lebih persuasif dan intens melakukan evaluasi , bimtek peningkatan mutu LPKS baik untuk pengelola maupun instruktur program pelatihan yang dilaksanakan oleh LPKS di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengawasan atau kontrol terhadap keberadaan LPKS di wilayah provinsi sebaiknya dilakukan lebih intensif mengingat informasi yang dibutuhkan oleh kelompok orang sangat bervariasi sehingga Dinas yang bersangkutan sebagai pembina bisa memberikan arahan yang dibutuhkan oleh kelompok - kelompok tersebut.
4. Sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai program kartu pra kerja ini diharapkan lebih intensif lagi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan kepada pengelola LPKS dan terus memotivasi mereka untuk selalu berbenah dan meningkatkan mutu program pelatihan yang dilaksanakan di lembaga pelatihan masing - masing agar siap bersaing secara lokal maupun nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, A. (2020, 1 Mei). *Kisruh Kartu Prakerja, KPK dan PPAK Dinilai Perlu Aktif Mengawasi*. Diakses dari: <https://tirto.id/kisruh-kartu-prakerja-kpk-dan-ppak-dinilai-perlu-aktif-mengawasi-fgP6bisa?page=all> dan-dirumahkan-tembus-6-juta-orang/)
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Ed. II)*. Penj. Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. New York: Prentice-Hall, Inc.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy (Ed. 6)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Fauzia, M. (2020, 23 April). *8 Mitra Kartu Prakerja Tak Tender dan Tak Ditunjuk Pemerintah, Kok Bisa?*. Diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2020/04/23/123400726/8-mitra-kartu-prakerja-tak-tender-dan-tak-ditunjuk-pemerintah-kok->

- <http://disnakertrans.sumselprov.go.id/> tugas pokok dan fungsi bidang Lattas (pelatihan dan produktivitas tenaga kerja) , diakses pada 27 Desember 2021 jam 10.00 WIB.
- <https://www.prakerja.go.id/press-release/melalui-kartu-prakerja-pemerintah-bantu-5-6-juta-pekerja-yang-terkena-dampak-langsung-dari-wabah-covid-19> diakses pada 23 Desember 2021 pukul 14:00 WIB.
- Indraini, A. (2020, 4 Mei). Kritik Pelatihan Kartu Prakerja, DPR: Rp. 5,6 T Mending Buat Bansos. Diakses dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5001872/kritik-pelatihan-kartu-pra-kerja-dpr-rp-56-t-mending-buat-bansos>
- Indriani. A.( 2020, 20 Desember 2021, 11.36 WIB ) . "detikFinance: Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan Tembus 6 Juta Orang", diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5072102/pekerja-yang-kena-phk-kemnaker-jaring-peserta-kartu-prakerja.html> , diakses pada 20 Desember 2021, 13.07 WIB.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja .Jakarta.
- Putra. Dwi Aditya. 2020. "Merdeka.com: Pemerintah Gunakan Data Korban PHK Kemenaker Jaring Peserta Kartu Prakerja".Diakses pada <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-gunakan-data-korban-phk->
- Subarsono, AG (2009). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, J. & Sani, A.F. (2020, 4 Mei). INDEF Jelaskan Mengapa DPR Sulit Awasi Program Kartu Prakerja. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1338541/indef-jelaskan-mengapa-dpr-sulit-awasi-program-kartu-prakerja>
- Wahab, S. A. (1997). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.